

Pemkot Bogor Salurkan Bansos BBM untuk Sopir Berbentuk Voucher

BOGOR (IM)- Pemerintah Kota Bogor, Jawa Barat, berencana menyalurkan bantuan sosial dampak penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) kepada 2.341 sopir angkutan umum kota dan ojek dalam jaringan dengan menjajaki kerja sama PT Pertamina dalam bentuk voucher.

Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Bogor, Eko Prabowo saat diwawancarai di Kota Bogor, Selasa (11/10), mengatakan penyaluran bantuan sosial masih dalam tahap verifikasi pemberkasan sopir calon penerima. "Rencananya begitu, tapi masih dikomunikasikan dengan PT Pertamina. Saat ini kita masih verifikasi data sopirnya," kata Eko.

Eko menyampaikan bansos BBM yang akan diberikan kepada 2.341 sopir itu sebesar Rp1,4 miliar dari Rp4,6 miliar dana alokasi umum (DAU) yang disisihkan Pemerintah Kota Bogor untuk memberi perhatian kepada masyarakat terdampak penyesuaian harga BBM.

Dia meninci penerima bansos terdiri dari 1.341 sopir angkot dan 1.000 sopir ojek daring. Alokasi dana bansos sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 134/PMK.07/2022 tentang Belanja Wajib Dalam Rangka Penanganan Dampak Inflasi Tahun 2022, yang mewajibkan pemda untuk menyalurkan 2 persen dari Dana Transfer Umum

(DTU) untuk bansos.

Adapun bansos tersebut diarahkan kepada ojek, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dan nelayan dan untuk penciptaan lapangan kerja serta pemberian subsidi sektor transportasi angkutan umum di daerah.

Namun demikian, kata Eko, mengenai jumlah sasaran dan bantuan melalui analisis Pemerintah Kota Bogor yang berkolaborasi dengan Organisasi Angkutan Darat (Organda) dan pihak perusahaan penyedia aplikasi ojek daring untuk menyeleksi penerima bansos.

Organda Kota Bogor sebelumnya telah melaporkan dari 6.000 sopir angkot yang bekerja di daerahnya, ada sebanyak 2.200 sopir angkot berkutu tanda penduduk (KTP) setempat mendaftar untuk mendapatkan bansos dampak penyesuaian harga BBM untuk diverifikasi oleh Dinas Perhubungan setempat.

Di sisi lain, menurut data Dinas Perhubungan Kota Bogor terdapat 7.000 sopir ojek daring yang bekerja di wilayahnya, namun akan diseleksi berdasarkan KTP dan kelengkapan penghasilan.

"Kuotanya sudah ada 2.341 orang sopir, ini yang kita sesuaikan berkasnya, dari yang terlapor oleh Organda dan perusahaan ojek daring mana yang masuk sebagai penerima," jelasnya. ● **jay/gio**

Pemkab Bogor Sita Ribuan Bungkus Rokok Ilegal

CIBINONG (IM)- Pemerintah Kabupaten Bogor menyita 1.553 bungkus rokok ilegal dari tiga lokasi di wilayah Kecamatan Cigombong, Selasa (11/10). Seluruhnya telah diserahkan ke pihak Bea Cukai.

"Sejak 2020, pemda memang dilibatkan untuk penindakan barang kena cukai, dalam hal ini rokok. Pemda mencari informasi, sosialisasi kemudian melaporkan ke Bea Cukai. Jadi tetap kewenangannya di Bea Cukai," kata Kepala Bagian Perencanaan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Bogor, Emy Sriwahyuni.

Pengepul rokok ilegal ini diketahui tinggal di beberapa rumah kontrakan. Di lokasi itu ditemukan rokok dengan merek Gucci hingga Dubai yang

tidak memiliki pita cukai, sehingga berpotensi merugikan pendapatan negara.

Emy menerangkan, rokok-rokok tersebut sempat beredar di warung-warung yang berada di sekitar lokasi penyitaan. Pemkab Bogor pun ikut menyita rokok tersebut dan diserahkan ke Bea Cukai Bogor.

"Kalau tidak bayar cukai kan merugikan negara. Karena pendapatan dari cukai rokok itu kan digunakan juga untuk pembiayaan BPJS, hingga pembangunan," jelas Emy.

Emy mengimbau masyarakat agar melapor jika menemukan adanya peredaran rokok tanpa cukai. "Kalau mau merokok pakai yang ada cukainya, jangan sampai merugikan negara," tegasnya. ● **jay**

Percasi Kab. Bogor Uji Coba Lawan Atlet Priangan Timur



Atlet catur Kabupaten Bogor yang mengikuti pertandingan persahabatan dengan pecatur Wilayah Priangan Timur.

BOGOR (IM)- Untuk memantapkan kesiapan jelang perhelatan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) XIV Jawa Barat tahun 2022, Persatuan Catur Seluruh Indonesia (Percasi) Kabupaten Bogor, mengikuti kegiatan try out atau uji coba dengan atlet catur Priangan Timur, di Lapangan 2B Kota Banjar pada Sabtu (8/10) lalu.

Sejumlah atlet ikut serta dalam kegiatan try out tersebut, yakni atlet-atlet terbaik se-Priangan Timur yang akan mengikuti Porprov 2022, seperti dari Kota Tasik, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar dan Kota Pangandaran.

Hasil pertandingan persahabatan perseorangan, atlet Percasi Kabupaten Bogor berhasil menguasai peringkat lima besar, bahkan pecatur

andalan Kabupaten Bogor, Arif Abdul Hafiz menjadi juara pertama.

Ketua Percasi Kabupaten Bogor, Ajat Rohmat Jatnika mengatakan, uji coba ini dilakukan untuk mengukur kematangan tim, baik atlet juga officialnya dalam menghadapi lawan saat pertandingan Porprov Jabar 2022 nanti.

"Melalui try out, kami ingin membangun tim Percasi yang kuat, kompak dan semakin solid kekeluargaannya, sesuai dengan motto catur yakni Gens Una Sumus yang artinya "Kita Adalah Keluarga". Kami berharap dengan kekompakan tim yang semakin kuat ini bisa meningkatkan motivasi untuk berprestasi menjadi yang terbaik," ungkap Ketua Percasi Kabupaten Bogor. ● **gio**

8 | Nusantara



POTENSI BENCANA DI KAWASAN BANDUNG UTARA

Foto udara kawasan Bandung Utara yang sebagian beralih fungsi dari hutan menjadi lahan pertanian dan permukiman di Cimeyan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/10). Data dari Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) mencatat, setiap tahunnya potensi bencana di kawasan Bandung Utara meningkat mulai dari banjir hingga tanah longsor yang diakibatkan oleh alih fungsi hutan menjadi lahan pertanian maupun permukiman dan kawasan wisata.

BNPB Ungkap Kab. Bogor Miliki Frekuensi Bencana Tertinggi di RI

Frekuensi kejadian banjir di Kabupaten Bogor luar biasa, lebih dari dua kali lipat dari kabupaten/kota lainnya. Ini menjadi perhatian kita untuk melihat kembali bagaimana bentang lahan kita saat ini, kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari.

JAKARTA (IM)- Badan Nasional Penanggulangan

Bencana (BNPB) mencatat Kabupaten Bogor, Jawa Barat, memiliki frekuensi bencana hidrometeorologi basah seperti banjir, cuaca ekstrem dan tanah longsor tertinggi di Indonesia. BNPB mencatat pada 2021, bencana hidrometeorologi memang mendominasi kawasan Jabodetabek.

"Kabupaten Bogor ini adalah dengan frekuensi kejadian bencana hidrometeorologi paling tinggi di Indonesia, tidak hanya di Jabodetabek," kata Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, Selasa (11/10). Sementara itu, secara his-

toris banjir Jabodetabek per kabupaten/kota dalam kurun waktu 2021-2022, Kabupaten Bogor tercatat sebanyak 181 kejadian, dibandingkan Jakarta Timur sebanyak 75 kejadian, dan Jakarta Selatan 57 kejadian.

Abdul mengatakan frekuensi kejadian banjir di Kabupaten Bogor dikatakan luar biasa, lebih dari dua kali lipat dari kabupaten/kota lainnya.

"Ini menjadi perhatian kita untuk melihat kembali bagaimana bentang lahan kita saat ini, karena pastinya kalau

kita berbicara hidrometeorologi basah tidak lepas dari daya dukung, daya tampung lingkungan," ujar Abdul.

Selain itu, secara historis korban jiwa akibat bencana hidrometeorologi basah di Jabodetabek tercatat paling tinggi di tahun 2020, yakni sebanyak 65 jiwa.

"Karena eskalasi banjir sebenarnya tidak terlalu banyak cakupan wilayahnya, tetapi tinggi airnya naik dengan cepat dan cukup signifikan sehingga banyak warga yang terjebak atau terkena sengatan listrik dan lain-lain," imbuhnya. ● **gio**

Satpol PP Segel Lahan Pembakaran Ban Bekas Ilegal di Desa Ciomas

CIBINONG (IM)- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor bersama Satpol PP menyegel aktivitas pembakaran ban bekas di wilayah Desa Ciomas, Kecamatan Tenjo, Kabupaten Bogor. Penyegekan di lahan tersebut lantaran tidak berizin atau ilegal.

Kasie Gakkum DLH Kabupaten Bogor, Dyan Heru Suchayyo mengatakan saat dilakukan penyegekan tempat itu sudah kosong. Diduga informasi sudah bocor sehingga aktivitas sudah ada seperti hari

biasanya. "Waktu kami ke sana itu seperti sudah ada info terlebih dahulu. Jadi kosong nggak ada orangnya, ditinggalin gitu," kata Dyan, Selasa (11/10).

Tidak hanya pembakaran ban bekas, di lokasi yang berupa hamparan lahan itu juga terdapat limbah kemasan. Kedua aktivitas itu tidak berizin atau ilegal. "Yang satu pembakaran ban, satunya itu kayaknya dari limbah pabrik. Saya temuin sih kayak limbah kemasan susu gitu. Itu hamparan, jadi satu

lagi hanya berupa pembakaran ban. Pintu masuknya kami segel. Jadi ada dua kegiatan," jelasnya.

Penyegekan ini dilakukan sampai batas yang tidak ditentukan hingga proses lebih lanjut. Sehingga, tidak boleh ada aktivitas apa pun di dalam lahan tersebut.

"Jadi sebelum pemiliknya datang ke Satpol PP belum bisa dibuka dan itu tetap ilegal. Nanti akan ditindaklanjuti pakai Perda harus bagaimana," tutupnya. ● **jay**

Pemkab Bogor dan Kementerian ATR Bahas Masalah Sempadan Sungai Hulu Ciliwung

BOGOR (IM)- Plt. Bupati Bogor, Iwan Setiawan menerima audiensi Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR, Ariodilah Virgantara, di Ruang Rapat Bupati Bogor, Cibinong, Senin (10/10).

Pertemuan tersebut membahas indikasi pelanggaran pemanfaatan ruang di sempadan sungai bagian hulu Ciliwung pada kawasan Puncak Kabupaten Bogor.

Hadir dari Kementerian

ATR/ BPN, Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang, Ariodilah Virgantara beserta jajaran, Kepala BBWSCC, Bambang Heri Mulyono beserta jajaran. Mendampingi Plt. Bupati Bogor, Kepala DPMP/TSP, Kepala DPUPR, Sekretaris Dinas DPKPP, Sekretaris Satpol PP, Camat Ciawi, Camat Megamendung, dan Camat Cisarua.

Iwan Setiawan mengungkapkan hasil kajian dari BBWSCC meminta kementerian terkait dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk menertibkan bangunan-bangunan yang

terindikasi melanggar dengan melewati atau yang dekat dengan sempadan Sungai Ciliwung.

Intinya ada kolaborasi antara Pemkab Bogor, Ditjen PPTR Kementerian ATR/BPN dan BBWSCC Kementerian PUPR untuk penanganan masalah ini. "Kalau memang ada bangunan yang melanggar aturan, kalau harus dibongkar ya bongkar. Yang penting semangatnya harus sama dari mulai tingkat pusat sampai ke daerah. Ada dukungan dari pusat, baik dukungan moral, maupun dukungan anggaran," tandas Iwan. ● **gio**



Plt Bupati Bogor, Iwan Setiawan bersama Direktur Penertiban Pemanfaatan Ruang Kementerian ATR/ BPN, Ariodilah Virgantara membahas GSS Hulu Ciliwung pada kawasan Puncak Kabupaten Bogor.

Trem Kota Bogor Diusulkan Satu Paket dengan LRT Cibubur-Baranangsiang

BOGOR (IM)- Kementerian Perhubungan (Kemhub) melalui Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkeretaapian mengusulkan pembangunan trem Kota Bogor dirancah satu paket dengan pembangunan lanjutan Light Rail Transit (LRT) Tahap II Cibubur-Baranangsiang.

Hal tersebut telah tertuang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bogor dan akan ditegaskan dalam Peraturan Daerah (Perda) Transportasi yang masih dalam pembahasan.

Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Bogor, Rudy Mashudi, menjelaskan

Pemkot Bogor sudah menyelesaikan Perda RTRW yang di dalamnya mengandung substansi perkeretaapian dalam kota atau trem ini, termasuk kawasan transit oriented development (TOD). Hal itu dilakukan guna mendukung konektivitas antara LRT, trem dan juga kereta api yang menjadi program strategis nasional.

"Sudah. Sudah masuk RTRW. Nanti ditegaskan lagi di Perda Transportasi. Sedang dibahas sama dewan. Seharusnya nanti di masa sidang akhir tahun," kata Rudy kepada Republika, Selasa (11/10).

Rudy menyebutkan, ada dua kunci dalam transportasi. Yaitu integrasi dan konektivitas.

Berbicara jangka panjang ke depan, kata dia, ketika ada LRT di Kota Bogor maka Pemkot Bogor harus mengkonseksikan angkutan yang ada di dalam kota. Sebab, jika tidak ada konektivitas maka dikhawatirkan bisa terjadi bottle neck.

"Masalahnya kalau ada bottle neck itu nanti kita punya masalah baru. Nah tentu komunikasi komunikasinya harus dari sekarang. Menyamakan anggaran pusat dengan kita," jelasnya. Sementara itu, Plt. Dirjen KA Kemhub, Zulmafendi, menyambut baik rencana pembangunan moda transportasi kereta dalam kota atau trem oleh Pemkot Bogor. Menurutnya, trem merupakan salah satu solusi alternatif transportasi di Kota Bogor di ten-

gah kondisinya yang semakin padat.

Dia menuturkan, Bogor dikenal sebagai kota yang hijau, nyaman, tenang dan sejuk. Kota Bogor sebagai daerah penyangga ibu kota, sangat berpotensi dilakukan pengembangan. Sehingga butuh didukung oleh moda transportasi yang memadai.

"Sangat kami dukung baik rencana ini. Ditjen KA sangat gembira dan menyambut baik bagaimana planning ke depan untuk pengembangan trem yang menjadi salah satu moda dan solusi pengaturan lalu lintas di Kota Bogor yang nyaman seperti dulu," bebernya.

Secara teknis, Zulmafendi memiliki usulan jika pembangunan trem Kota Bogor disatu-paketkan dengan pembangunan lanjutan LRT Tahap II Cibubur-Baranangsiang. Lanjutan pembangunan itu juga sudah memiliki studi dan perencanaan.

"Ini baru pemikiran sementara, apakah mungkin langsung digabung. Dan bisa saja Pemkot diuntungkan dengan itu. LRT dengan trem saling connecting, jadi nanti bisa sama-sama kita kaji," jelasnya.

Dengan usulan itu, Zulmafendi mengatakan Kemhub siap membentuk tim untuk konsentrasi terhadap trem Kota Bogor. Sehingga dengan studi kelayakan atau feasibility study (FS) yang sudah ada tinggal dimatangkan kembali.

Wakil Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan perencanaan trem Kota Bogor sudah cukup matang. Setelah FS yang sudah dilakukan Colas Rail, Pemkot Bogor juga sudah melakukan komunikasi dengan PT KAI dan kajian dari Universitas Indonesia (UI).

"Kami butuh arahan lebih lanjut dari Kemhub bagaimana langkah ke depan. Kami juga sudah berkomunikasi dengan PT INKA, mereka berharap (trem) bisa terwujud," jelas Dedie.

Dia menambahkan, trem menjadi transportasi yang representatif. Jika Kota Bogor sukses dalam menjalankan moda transportasi trem, maka akan menjadi contoh untuk kota-kota lainnya. ● **gio**